

STUDI PENERAPAN PSAK 45 YAYASAN PANTI ASUHAN YABAPPENATIM JEMBER

Norita Citra Yulianti

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim in managing funds from donors, and distribution process more inclined to charity to help education, health assistance, and support working capital.

In the case of this disclosure orphanage foundation has not made a note to the financial statements and for the presentation of its financial statements Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim make two simple financial statement balance sheet and statement of sources and utilization of funds.

Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim has met the statutory regulations charity to make the financial statements. However, the components of financial statements that are made not complete and not fulfill the components of financial statements in accordance with IAS 45, because of limited funds and human resources are managed.

The financial statements have not been audited by an independent auditor or by a public accounting firm. Because if the audited it will provide added value for Transparency and accountability to the financial statements he made that will increase public confidence in the Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim to manage, distribute and use it.

Key words: Accounting Foundation, IAS 45, Financial Reporting.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdinya yayasan sudah dimulai sejak zaman pra kemerdekaan. Ketika itu tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat di suatu daerah. Yayasan secara mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Walaupun dalam perjalanannya ia membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan bisnis, hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana saja bukan kegiatan utama yayasan.

Sejalan dengan semakin luasnya kesempatan untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu permasalahan untuk dibahas, peran yayasan atau lembaga nirlaba yang digerakkan oleh masyarakat sendiri menjadi semakin penting. Kini lembaga nirlaba berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan. Selain itu area pelayanan juga semakin melebar bahkan dari segi ukuran lembaga nirlaba tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai raksasa dalam dunia bisnis. Secara garis besar tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : memperoleh laba (bisnis), sedangkan yang lainnya adalah nirlaba.

Meskipun lembaga yayasan mempunyai karakteristik dan tujuan organisasional yang berbeda dari perusahaan yang orientasi laba, namun bukan berarti akuntansinya sama sekali berbeda. Persamaan antara akuntansi yayasan dengan akuntansi perusahaan adalah meliputi keseluruhan proses akuntansi mulaidengan pengakuan transaksi, selanjutnya diikuti dengan pencatatan ke buku kasumum dan pencatatan dalam buku pembantu serta tambahannya dan pelaporanlaporan keuangan. Suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasikuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yangdimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yangdigunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif yang disebut akuntansi.

Informasi akuntansi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sangat diperlukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, maka laporan keuangan yayasan harus disusun berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009 : 45.3) dalam PSAK No. 45tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Laporan Keuangan OrganisasiNirlaba seperti yayasan meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periodepelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan,dan catatan atas laporan keuangan.

Fungsi akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja pegawai serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu informasi perhitungan laporan keuangan yayasan harus dilakukan dengan benar. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian sejumlah rekening-rekening pada laporan keuangan karena tidak semua metode akuntansi yang dipakai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam dituangkan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Yabappentim Jember?
2. Bagaimana perbedaan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Yabappentim Jember dengan standar akuntansi ED PSAK No 45?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Yayasan

Menurut Indra Bastian (2007 : 1) yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan. Menurut Pahala Nainggalon (2005 : 1) yayasan merupakan suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Menurut Anwar Borahima (2002) setelah 56 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 6 agustus 2001, barulah dapat dibuat

undang-undang yang mengatur mengenai yayasan yaitu undang-undang (UU) Nompr 16 tahun 2001 tentang Yayasan dimuat dalam Lembaga Negara (LN) No 112/2001 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4123. Itu pun baru diberlakukan 6 agustus 2002. Sebelumnya, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur yayasan. Ketentuan perundang-undangan yang ada pada waktu itu, tidak satupun yang memberikan rumusan mengenai definisi yayasan, status hukum yayasan, serta cara mendirikan yayasan. Berbeda halnya dengan di Belanda, yang secara tegas di dalam undang-undangnya menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum.

Walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi.

Untuk diakui sebagai badan hukum, yayasan hanya perlu memenuhi syarat tertentu, yaitu:

- 1) Syarat materil yang terdiri dari; harus ada suatu pemisahan harta kekayaan, adanya suatu tujuan, dan mempunyai suatu organisasi;
- 2) Syarat formil yaitu harus dengan akta autentik.

Di dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan didirikan dengan akta notaries. Akta notaris ini ada didaftarkan pengadilan negeri, dan diumumkan dalam Berita Negara. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga masih bebas bentuk. Dengan demikian, yayasan dapat juga didirikan dengan akta dibawah tangan. Setelah keluarnya UU Yayasan, secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada dalam UU Yayasan tersebut. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri.

Dari ketentuan UU yayasan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat pendirian, yaitu:

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
4. Harus memperoleh pengesahan Menteri;
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".

Bagi yayasan yang belum terdaftar, harus melakukan pendaftaran lebih dahulu, kemudian menyesuaikan anggaran dasarnya. Persyaratan pendaftaran merupakan suatu hal yang kontradiktif, karena justru didalam UU Yayasan No 16/2001 tidak ada kewajiban bagi yayasan yang baru untuk didaftarkan setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri. Kewajiban yang dibebankan kepada yayasan setelah disahkan hanyalah kewajiban untuk mengumumkan dalam berita Negara. Seharusnya penekanan aturan peralihan bukan pada pendaftaran, melainkan pada syarat jumlah minimal kekayaan yang dimiliki serta prospek kegiatan yayasan itu sendiri. Bagi yayasan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal kekayaan yang harus dimiliki oleh yayasan dan atau prospek kegiatan yayasan tidak mungkin

untuk dikembangkan, yayasan tersebut dapat dibubarkan. Dengan demikian kerugian yang mungkin timbul baik bagi organ yayasan maupun dengan pihak ketiga dapat diminimalisir.

2.2 Akuntansi Yayasan

Menurut pahala nainggolan (2005 : 4) lembaga berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan. Beberapa fokus ke kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat sedangkan yang lainnya terjun keimplementasi program untuk secara langsung menyelesaikan suatu isu yang berkembang. Sejalanannya dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis, kini terjadi seleksi alam atas keberadaan yayasan maupun lembaga nirlaba yang ada. Masyarakat menuntut diterapkan good governance atau tata kelola organisasi yang baik pada yayasan. Pada pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan.

Transparansi dan akuntabilitas memerlukan infrastruktur pengadministrasikan dan pelaporan memadai. Demikian juga pemenuhan kewajiban perpajakan hanya dapat dilakukan bila system keuangan sudah berjalan baik. Di samping itu, stakeholders yayasan termasuk para donor, apalagi jika pendapatan yayasan dari publik, jelas memerlukan segala informasi tentang pengelolaan yayasan. Dengan demikian, pentingnya sistem keuangan yayasan karena terkait oleh kebutuhan stakeholdernya. Akuntansi sebagai salah satu untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan keuangan lembaga dapat mendorong keterbukaan lembaga. Dengan sistem dan prosedur keuangan yang terstruktur, lembaga dapat dengan mudah memenuhi tuntutan transparansi kepada stakeholdernya. Pelaporan yang tepat waktu dan diikuti dengan kualitas informasi yang tinggi pada satu sisi dapat mendorong keterbukaan, pada sisi yang lain justru menjadi umpan balik kepada internal lembaga.

2.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Pahala Nainggolan (2005 : 69) catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aktiva tetap. Catatan atas laporan keuangan akan memberikan perincian dari total aktiva tetap yang disajikan. Perincian ini dalam bentuk penggolongan aktiva tetap berdasarkan jenis-jenis aktiva tetap. Catatan atas laporan keuangan juga ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dilakukan seperti misalnya metode penyusutan apa yang akan digunakan dalam menghitung biaya depresiasi aktiva tetap, berapa estimasi usia pakai aktiva tadi dan lain sebagainya.

2.4 Pelaporan Laporan Keuangan

Menurut Pahala Nainggolan (2005 : 72) berdasarkan periode penerbitannya, laporan-laporan yang diproduksi oleh yayasan dapat dikategorikan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- Pelaporan Setiap Bulanan
- Pelaporan Setiap Kuartalan
- Pelaporan Setiap Tahunan

2.5 Jenis-jenis Pendapatan Yayasan (Sumbangan)

Pendapatan yang diperoleh dibagi dalam tiga kategori berdasarkan restriksi (pembatasan) yang ditentukan oleh sumber pendapatan itu. Pendapatan yayasan dengan demikian terbagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

1. Pendapatan Tidak Terikat (*unrestricted*)

Sumbangan atau donasi yang diterima yang tidak menyebutkan limitasi atau penggunaan yang diinginkan oleh pemberinya adalah sumbangan yang termasuk dalam golongan sumbangan tidak terikat. Dengan demikian yayasan memiliki kebebasan penuh untuk mengalokasikan penggunaannya.

2. Pendapatan Terikat Sementara (*Temporarily Restricted*)

Pendapatan ini umumnya diperoleh dari sumbangan yang diperoleh dari donor secara khusus menyebutkan tujuan penggunaannya serta jangka waktu penggunaannya.

3. Pendapatan Terikat Permanen (*restricted*)

Kategori sumber dana lain adalah sumber dana dengan batasan atau restriksi permanen. Sumber dana ini biasanya diperoleh dengan batasan yang jelas untuk penggunaannya dan diasumsikan bahwa waktu penggunaannya selamanya. Artinya, hanya untuk tujuan yang dimaksud dan berlaku selamanya. Misalnya, suatu yayasan yang memperoleh donasi dalam bentuk gedung kantor yang diberikan batasan bahwa gedung tadi hanya boleh digunakan untuk kegiatan operasional yayasan. Dengan demikian, gedung tidak boleh diperjual belikan baik sekarang maupun dimasa depan untuk alasan apapun.

2.6 PSAK 45

PSAK 45 tidak spesifik mengatur tentang akuntansi yayasan melainkan mengatur

Akuntansi untuk organisasi nirlaba. PSAK 45 juga tidak menyatakan dengan pasti bahwa akuntansi yang diatur di dalamnya ditentukan berdasarkan system dana. Namun apabila dicermati, terlihat seperti system dana.

Dana dalam PSAK 45 bersifat *single entity*, yaitu hanya jenis laporan untuk masing – masing kategori , yaitu : satu neraca , satu laporan aktivitas , dan satu laporan arus kas. Semua unsur rekening masuk dalam neraca, aktiva lancar dan aktiva tetap, utang jangka pendek dan utang jangka panjang, serta aktiva bersih (seperti saldo dana).

Aspek yang membuat PSAK 45 seperti system dana terletak pada ketentuan sebagai berikut :

- Sumber penerimaan dari pihak lain, donator atau pemerintah, yang ada ketentuan terbatas atau tidak terbatas (*unrestricted atau unrestricted*) dalam penggunaan harus dipisahkan rekeningnya .

- Aktiva bersih (seperti saldo dana atau ekuitas dalam akuntansi komersial) dikelompokkan dalam berbagai rekening seperti : aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

2.7 Manajemen Yayasan

- Dalam mengelola suatu yayasan, diperlukan pemahaman dan keahlian dasar tentang manajemen. Keahlian *pertama* adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Seorang pengelola dapat menggunakan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena tidak semua masalah dan keputusan yang dibuat bisa dipecahkan dengan pendekatan rasional. Keahlian yang kedua adalah perencanaan, yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Keahlian yang *ketiga* adalah pendelegasian, yaitu ketika pengawas memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada bawahannya untuk melengkapi tugas, dan menggambarkan bagaimana tugas tersebut dapat diselesaikan. Pendelegasian yang efektif dapat mengembangkan orang menjadi lebih produktif. Keahlian yang *keempat* adalah dasar-dasar komunikasi internal, yaitu terjalinnya komunikasi secara efektif yang akan menjadi “darah kehidupan” bagi suatu organisasi. Keahlian yang *kelima* adalah manajemen rapat, yaitu penerapan sistem rapat secara efektif untuk memecahkan persoalan yang dihadapi yayasan, baik persoalan eksternal maupun internal.
- Pengelola yayasan harus melakukan penggalan dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan organisasi. Hal ini penting karena yayasan tidak melakukan kegiatan yang berorientasi profit. Dalam penggalan dana ini, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan.
- Program kerja yang disusun dengan baik dan logis akan meringankan persoalan klasik dan pelik bagi institusi yayasan, yaitu perencanaan. Pengelola lembaga harus mampu menyusun rencana program yang baik dan logis untuk pelaksana dan donor. Program yang koheren dan logis akan meyakinkan dan donor untuk mendukungnya.
- Komponen kunci dari penilaian keadaan yayasan adalah evaluasi efisiensi dan efektivitas program. Evaluasi ini akan memberikan data mengenai apakah masing-masing program akan dilanjutkan atau tidak, mempertahankan program tersebut pada tingkat yang ada, memperluas atau mengubah arah program tersebut, dan memasarkannya secara agresif.
- Pengelolaan keuangan dalam suatu yayasan akan memberikan keseluruhan perspektif proses dasar bagi manajemen keuangan yayasan. Pengelolaan keuangan yang baik akan tergambar dari laporan keuangan atau sistem akuntansi yang ditetapkan oleh yayasan tersebut. Dalam sistem akuntansi, siklus akuntansi meliputi pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan analisis informasi dari laporan keuangan.

2.8 Perencanaan Yayasan

Perbedaan utama antara rencana strategis dan rencana jangka panjang adalah focus pengembangan. Pada umumnya, perencanaan jangka panjang dipertimbangkan dalam rencana tindakan untuk suatu tujuan atau serangkaian

tujuan selama beberapa tahun. Asumsi utama rencana jangka panjang adalah terpenuhinya informasi tentang kondisi masa depan. Sebagai contoh, dalam lima puluh tahun terakhir dan enam puluh pertama, ekonomi Amerika secara relative stabil dan oleh karena itu, dapat diprediksi. Perencanaan jangka panjang sangat banyak modelnya; dan semuanya dilandasi oleh lingkungan asumsi yang tidak dapat diprediksi. Focus perencanaan adalah penyelesaian tujuan yang telah disepakati.

Yayasan, sebagai suatu organisasi nonprofit, mengarahkan proses perencanaan dan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh. Sumber daya utama yang diperlukan untuk perencanaan adalah waktu pengelola, waktu Pembina, dan uang (seperti penelitian pasar, para konsultan, dan sebagainya).

Suatu pernyataan visi yang realistis dan dipercaya harus ditetapkan secara baik dan dapat dipahami secara mudah, tepat, ambisius, serta responsif terhadap perubahan. Suatu visi juga harus berorientasi pada energi kelompok dan berperan sebagai pedoman terhadap tindakan. Visi harus konsisten dengan nilai yayasan. Serta singkat, suatu visi dapat menantang dan memberikan inspirasi kepada kelompok untuk mencapai misinya.

Hasil perencanaan sangat ditentukan oleh informasi yang diperoleh dan pilihan atas eksploitasi sumber daya. Implementasi ide yang luar biasa tentang produk, jasa, dan program lembaga tergantung pada sumber daya serta skala prioritas. Jadi, rencana evaluasi program dipengaruhi oleh proses pembuatan keputusan. Manajemen biasanya dihadapkan dengan pembuatan keputusan untuk menurunkan dana, komplain yang terus menerus, kebutuhan yang tidak terpenuhi diantara para pelanggan dan klien, serta kebutuhan untuk memperbaiki penyampaian jasa; seperti, apakah lebih banyak catatan yang harus dibuat dalam perjalanan program, apakah pelaksanaan program mencapai tujuan yayasan atau tidak, dan pengaruh program terhadap pelanggan? Informasi yang dibutuhkan merupakan kombinasi dari berbagai pertanyaan diatas. Fokus pengujian evaluasi perlu ditetapkan agar pelaksanaan evaluasi lebih efisien dari segi biaya, waktu, dan sumber daya yang dicurahkan.

2.9 Akuntabilitas Yayasan

Pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk menilai :

- Jasa yayasan dan kemampuan yayasan untuk memberikan jasa secara berkesinambungan.
- Mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola.

Kemampuan yayasan dalam mengelola jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan, dimana informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut, akan disampaikan. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban pengelola yayasan tentang hasil pengelolaan sumber daya yayasan disajikan melalui laporan aktifitas akan dan laporan arus kas. Laporan aktifitas akan menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan. Pengelola yayasan perlu mengembangkan keahlian dasar tentang manajemen keuangan. Dalam suatu yayasan, tugas lainnya adalah mengelola keuangan yang secara jelas merupakan tugas yang sulit. Keahlian dasar dalam manajemen keuangan mulai dari bidang kritis manajemen kas dan pembukuan, harus dilakukan sesuai dengan kontrak keuangan tertentu untuk memastikan keterpaduan proses pembukuan. Pengelola yayasan sebaiknya mempelajari bagaimana menyusun laporan keuangan (dari jurnal pembukuan) dan menganalisis laporan tersebut agar dapat memahami kondisi keuangan dari aktivitas yayasan tersebut dengan benar. Analisis keuangan akan memperlihatkan “realitas” keadaan aktifitas yayasan – sebagaimana yang terlihat dalam manajemen keuangan sebagai salah satu dari sebagian besar praktek penting dalam manajemen.

2.10 Pengendalian Keuangan

Sistem pengendalian keuangan (akuntansi) adalah serangkaian prosedur yang melindungi praktek manajemen secara umum maupun dari segi keuangan. Prosedur pengendalian akuntansi bertujuan agar :

- Informasi keuangan reliable (dapat dipercaya) sehingga pengelola dapat memperoleh informasi yang akurat untuk perencanaan program dan keputusan lainnya.
- Aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja.
- Kebijakan-kebijakan yayasan diikuti.
- Peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.

Langkah pertama dalam pengembangan sistem pengendalian akuntansi yang efektif adalah mengidentifikasi bidang dimana penyalahgunaan atau kesalahan-kesalahan sangat mungkin terjadi. Beberapa akuntan akan memberikan checklist (daftar pengecekan) menyangkut bidang dan pertanyaan tentang waktu perencanaan sistem. “*Price Waterhouse’s booklet, Effective Internal Accounting Control for Nonprofit Organizations : A Guide for Directors and Management*”, memasukkan bidang dan tujuan pengembangan sistem pengendalian akuntansi yang efektif.

Sistem pengendalian akuntansi diperlukan untuk memastikan pencatatan yang tepat atas barang yang didermakan, sumbangan, dan penerimaan lainnya. Laporan keuangan dan pengembalian informasi harus dicatat secara akurat dan tepat waktu, serta memenuhi peraturan pemerintah lainnya.

2.11 Investasi Yayasan

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, yayasan dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki dampak jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak

jangka pendek. Kesalahan dalam mengambil keputusan investasi tidak saja akan berdampak terhadap anggaran tahun berjalan, tetapi juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Investasi memiliki kaitan yang erat dengan penganggarn modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi secara lebih efisien dan efektif, perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktek manajemen keuangan disektor publik. Selain itu, program investasi juga merupakan bentuk dari *dual budgeting*, yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin..

2.12 Audit Yayasan

Audit adalah proses pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yayasan. Proses pengujian ini akan memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan yayasan mewakili posisi keuangan yayasan, dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). GAAP ditetapkan oleh *the American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Anggota dewan pengurus, staf, dan sanak keluarganya tidak dapat melakukan audit, karena hubungan kekeluargaan dengan yayasan akan mempengaruhi independensi auditor.

DiIndonesia, permasalahan agen audit sektor publik merupakan hal yang serius. Ini berarti kejelasan tentang peristilahan perlu dilakukan sebelum membahas audit dan pengawasan. Dalam buku ini, istilah auditor merupakan sebutan bagi seseorang yang melakukan pemeriksaan eksternal disektor publik, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik.

Disisi lain, peristilahan pegawai digunakan untuk sebutan auditor internal. Saat ini, auditor internal yang ada dalam pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jendral, dan Badan Pengawas Daerah, selalu dikaitkan dengan peristilahan pengawas. Di yayasan, pengawas ditunjuk oleh dewan pengurus, yang bisa berasal dari staf bagian keuangan atau bendahara dewan pengurus.

Dalam audit, penetapan tujuan perlu dimulai untuk menentukan jenis audit apa yang akan dilaksanakan serta standar audit apa yang harus diikuti oleh auditor. Audit dapat mempunyai gabungan tujuan dari audit keuangan dan audit kinerja, atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit. Misalnya, dalam pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan Pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya; tujuan audit yang demikian sering kali mencakup baik tujuan audit keuangan maupun tujuan audit kinerja. Audit semacam ini umumnya disebut audit kontrak, yang contohnya adalah audit atas pelaksanaan sistem pengendalian internal, atas masalah yang berkaitan dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, atau atas suatu sistem berbasis computer.

2.13 Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Yayasan

Terdapat banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan audit, dan tidak ada satu pendekatan pun yang paling tepat. Hal ini mungkin akan menimbulkan kebingungan bagi pendatang baru dalam pekerjaan audit.

Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu yayasan. Auditor mengeluarkan suatu opini atas laporan keuangan yayasan. Laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola yayasan menggunakan data-data mentah akuntansi untuk kemudian dialokasikan ke masing-masing laporan surplus-defisit dan neraca serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan yang dipublikasikan.

Hubungan antara akuntansi dengan auditing bersifat tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan proses auditing. Lebih jauh lagi, auditor harus membuat suatu keputusan tentang pengalokasian data-data akuntansi yang dimiliki oleh pihak manajemen. Auditor juga harus memutuskan apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai atau terdapat salah saji. Untuk membuat semua keputusan tersebut, auditor tidak dapat membatasi dirinya hanya dengan menggunakan perekaman bukti akuntansi dan rekening-rekening yang ada dalam yayasan. Dalam kenyataannya, auditor juga harus memperhatikan seluruh hal yang ada dalam yayasan, karena perilaku yayasan tidak hanya akan mempengaruhi data yang ada, tetapi juga, yang lebih penting lagi, kebijakan pengelola berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan data.

3. METODA PENELITIAN

Metodologi sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (Mulana, 2002:145) merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Pengertian ini menegaskan bahwa metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti (Nawawi, 1998:63). Seperti juga yang dikemukakan oleh Moh. Nazir (1988:63) yaitu:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan yayasan sehingga nantinya akan

memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan psak 45 pada Yayasan Panti Asuhan Yabapenatim Jember

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengumpulan Panti Asuhan Yabbapenatim Jember

Panti asuhan memiliki fungsi menampung, mengasuh, membina, dan mendidik anak-anak yang kurang beruntung nasibnya, baik berstatus yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar maupun dari keluarga kurang mampu (dhuafa).

Panti asuhan merupakan sarana kesejahteraan social suatu bentuk hidup kehidupan yang tercukupi kebutuhan material spiritualnya, senantiasa berada dalam rasa aman, tentram, tenang dan damai penuh pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian akan memungkinkan bagi setiap individu manusia untuk dapat berusaha memenuhi jasmaniah dan rohaniah dengan sebaik-baiknya, baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Panti asuhan merupakan sarana pelayanan yang membantu orang lain, baik langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan taraf hidup. Usaha pelayanan kesejahteraan sosial adalah upaya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan membina, memelihara, memulihkan serta mengembangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada beberapa kendala dalam mengelola panti asuhan antara lain adalah sumber dana tidak menentu. Sering upaya manusia dalam mengumpulkan dana sangat tidak layak, mulai dari mengirimkan wesel pada orang yang dikenal alamatnya, menghadang mobil di jalanan, menyuruh anak-anak untuk membawa tabung sumbangan di pinggir jalanan dan lain-lain.

Penggunaannya ada yang bagus ada pula yang tidak dipertanggungjawabkan sama sekali. Demikian juga tentang dana perawatan yang tidak jelas sumber dan penggunaannya. Keadaan ini rasanya tidak sesuai untuk disejajarkan dengan eksistensi panti asuhan yang suci ini. Tingkat kesejahteraan ekonomi umat yang masih bergelut dalam kemiskinan merupakan kendala pengembangan fungsi dan peranan panti asuhan. Panti asuhan selain sebagai pusat kebudayaan ibadah, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana pengembangan kebudayaan umat Islam. Banyak Panti asuhan yang tidak memiliki sumber dana tetap hanya bergantung pada datangnya dana dari donatur. Sehingga untuk menambah sarana lainnya seperti ruang tempat tidur, biaya pendidikan, makanan sehari-hari, ruang belajar, kamar mandi/WC, ruang tamu, ruang kegiatan ketrampilan, ruang kantor, gudang peralatan, ruang dapur dan lain-lain tidak cukup. Bahkan untuk perawatan saja tidak mencukupi. Maka dari itu idealnya panti asuhan harus mempunyai pengelolaan panti asuhan yang baik dalam pengelolaannya, mulai dari manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen kegiatan sampai manajemen organisasi panti asuhan, semua itu bisa tercapai ketika ada faktor-faktor lain yang mendukungnya, antara lain adalah sumber daya manusia (pengurusnya) harus yang berkualitas, sumber daya alam (pemasukan panti asuhan, letak Panti asuhan yang strategis), adanya program kerja yang jelas dan terarah (terarah untuk pengelolaan panti asuhan), yang kesemua itu saling mendukung untuk pengelolaan panti asuhan yang ideal.

Banyak jalan dan cara untuk memberikan santunan, bantuan dan pertolongan kepada anak-anak yatim yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan hidup. Mereka yang ingin menyantuni sesuai dengan kemampuan dapat melakukan

dengan cara memberikan sedekah dan infaq dari sebagian rezekinya melalui kotak-kotak amal dan atau langsung mengantarkannya ketempat-tempat anak yatim piatu, bantuan dapat pula diberikan dalam bentuk makanan, buku-buku bacaan maupun buku pelajaran, pakaian yang layak pakai dan apapun yang mereka butuhkan.

Mereka yang memiliki kelapangan dan kemampuan rezeki dapat pula menjadi donator atau penyumbang tetap dan rutin berupa sedekah dan infaq kepada anak-anak yatim baik yang bersifat perorangan dalam keluarga-keluarga mereka maupun melalui yayasan dan panti-panti asuhan.

Sumbangan dari masyarakat bukan hanya berbentuk dana (uang) tapi juga berupa barang atau makanan untuk kebutuhan anak-anak panti asuhan.

Kepedulian masyarakat terhadap keberadaan panti asuhan kurang, jadi dalam penggalan dana dengan mencari peluang dan kesempatan, misalnya dalam forum pengajian para pengurus untuk memberikan dana bagi panti asuhan. Melalui dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah dari masyarakat, pemerintah dan pengurus sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti.

4.2 Pengelolaan Dana Panti Asuhan Yabbapenatim

Langkah awal panti asuhan dalam pengelolaan dana adalah dengan melalui penyebaran proposal oleh pengasuh yang ditugaskan. Perlu diketahui pengurus panti dan yayasan dalam jabatannya masing-masing tidak berfungsi, itu hanya sebuah formalitas belaka. Jadi yang berfungsi adalah para pengasuh atas mandat dari bendahara panti dan yayasan.

Mereka juga aktif dalam pemberian dana seperti pengurus-pengurus lain.

Pengelolaan dana dalam panti menjadi perhatian serius karena dana tersebut adalah dana yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Berarti para pengelola panti asuhan harus mampu mengemban amanah yang di berikan oleh masyarakat dan pemerintah agar dana tersebut efektif dan bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh.

Dalam suatu organisasi baik bersifat materi atau non materi sepatutnya memiliki sistem pengelolaan yang baik bagi organisasinya. Dengan begitu tujuan organisasi tersebut akan mudah tercapai. Dengan dana sefisien mungkin guna mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengindahkan nilai-nilai islami itulah disyariatkan dalam Islam.

Di panti asuhan dana berasal dari bantuan masyarakat dan pemerintah selain dari pengurus sendiri, seperti di Panti Asuhan Yabbapenatim dana didapat dari zakat, nfaq dan sedekah dan usaha panti asuhan yang bersifat produktif yaitu penjualan binatang peliharaan dimulai pada tahun 2008.

Dana panti asuhan ada yang bersumber dari donatur yang bersifat tetap dan tidak tetap. Donatur yang bersifat tetap yang dimulai sejak tahun 2001, dan dari para pengurus panti dan yayasan dengan menggunakan sistem perbulan atau pertahun. Sedang dana tidak tetap yaitu dana yang berasal dari masyarakat/pemerintah yang tidak tetap.

Langkah awal panti asuhan dalam pengelolaan dana adalah dengan melalui penyebaran proposal oleh pengasuh yang ditugaskan. Perlu diketahui pengurus panti dan yayasan dalam jabatannya masing-masing tidak berfungsi, itu hanya sebuah formalitas belaka. Jadi yang berfungsi adalah para pengasuh atas mandat

dari bendahara panti dan yayasan. Namun ada juga pengurus yang aktif dalam pengembangan panti asuhan

4.3 Proses Penyaluran Dana Panti Asuhan

Dalam proses penyaluran dana panti asuhan di kelola langsung oleh bendahara panti asuhan. Perlu diketahui bendahara panti atau yayasan diberikan kepercayaan penuh dalam mengatur keuangan tersebut sehingga para pengasuh lain hanya menerima laporannya saja. Proses dana masuk yang mengetahui adalah para pengasuh jika datang langsung ke panti atau dengan penarikan donasi dari para pengurus yang menjadi donatur tetap yang dibantu oleh anak asuh, dan setelah itu diserahkan pada pengasuh kemudian di catat seterusnya disampaikan pada bendahara panti atau yayasan, kemudian digunakan untuk kebutuhan yang diserahkan pada pengasuh, dan akhirnya sampai pada anak-anak panti.

Panti asuhan harus memberikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) untuk yayasan Dharmais, yang dibuat oleh bendahara panti dan yayasan yang dibantu oleh pengasuh. Dimana dalam laporan tersebut berisi tentang jumlah kebutuhan pengeluaran perbulannya dalam menjalani kegiatan panti asuhan.

4.4 Perlakuan Akuntansi Yayasan

Proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari proses pengumpulan bukti transaksi seperti buku bank, bukti pembayaran, bukti penerimaan (kwitansi setoran dan kwitansi penerimaan) dan lainnya kemudian bukti itu di catat dalam buku kas, kemudian di jurnal dan dicatat dalam buku besar, diposting ke neraca saldo, kemudian dibuat laporan keuangan.

Proses penyusunan laporan keuangan panti asuhan berawal dari bukti penerimaan atau bukti pembayaran dan bukti penerimaan dari bendahara berupa kwitansi kemudian di catat di buku kas perolehan harian dan buku kas distribusi harian. lalu direkap dan dibuat laporan keuangan bulanan dan tahunan.

Laporan keuangan yang dibuat lembaga amal harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian.

1. Pengakuan

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak (Suwardjono, 2008: 134).

2. Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan *statement* keuangan (Suwardjono, 2008:133).

3. Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Sedangkan penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat *statement* keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif

(Suwardjono, 2008:134). Dengan demikian yayasan harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan yayasan panti asuhan.

Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan di yayasan panti asuhan adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berisi penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan. Dalam catatan ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan dalam manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Pengakuan akuntansi terhadap dana yayasan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Yabbapenatim Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan.

Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan di yayasan adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berisi penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan. Dalam catatan ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan dalam manajemen sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Namun, mengenai catatan atas laporan keuangan ini, Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim Jember belum membuatnya.

Laporan ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam satu periode, menilai kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa bantuan dan mempertanggungjawabkannya pada pimpinan dan masyarakat.

Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim sudah membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan namun belum sesuai dengan PSAK 45 tentang akuntansi yayasan, karena komponen laporan keuangan yang dibuat belum lengkap, yaitu hanya membuat satu laporan keuangan saja. Yakni laporan sumber dan penggunaan dana.

4.5 Audit Terhadap Laporan Keuangan

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sampai saat ini laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim belum di audit oleh Auditor Internal. Pembuatan Laporan Keuangan Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim adalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya donatur.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa simpulan berikut, antara lain:

1. Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim dalam mengelola dana yang berasal dari donatur, dan proses pendistribusian lebih condong ke santunan kepada bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan modal kerja.

2. Dalam hal pengungkapan ini yayasan panti asuhan belum membuat catatan atas laporan keuangan Dan untuk penyajian laporan keuangannya Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim membuat dua laporan keuangan yaitu neraca sederhana dan laporan sumber dan pendayagunaan dana.
3. Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim sudah memenuhi peraturan perundang-undangan zakat untuk membuat laporan keuangan. Namun komponen laporan keuangan yang dibuat belum lengkap dan belum memenuhi komponen laporan keuangan menurut PSAK 45, karena keterbatasan dana yang dikelola dan SDM.
4. Laporan keuangan belum diaudit oleh auditor independen maupun oleh kantor akuntan public. Dikarenakan apabila sudah diaudit maka akan memberikan nilai tambah bagi transparansi serta akuntabilitas terhadap laporan keuangan yang dibuatnya sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim untuk mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa mengambil objek penelitian yang lain untuk pembandingan. Alangkah lebih baik jika objek penelitian lebih dari dua sehingga bisa dikomparasi dengan lebih variatif. Serta tidak menutup kemungkinan jika IAI sudah mengesahkan PSAK 45 selain mengkomparasi laporan keuangan peneliti juga bisa menganalisis kepatuhan yayasan terutama nirlaba.
2. Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan lebih lama dan menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin agar bisa memahami dan lebih tahu mengenai siklus akuntansinya sampai proses pembuatan laporan keuangan.
3. Standar akuntansi yayasan diperlukan karena standar akuntansi menjadi kunci sukses lembaga pengelola yayasan dalam melayani masyarakat sehingga lembaga ini harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison., 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta
- Bastian, Indra., 2005, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Borahima, Anwar., 2 September 2002. *Eksistensi Yayasan di Indonesia*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/020902/opinieksi33.htm>.
- Carter, K. William., 2009, *Akuntansi Biaya*, Edisi 14, Buku 1, Penerbit SalembaEmpat, Jakarta.

- Dyckman, R. Thomas, Roland E. Dukes, Charles J. Davis, 2000, *Akuntansi Intermediate*, Edisi 3, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul., 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Syafri Sofyan, 2007, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, Per 1 Juli 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso, E. Donald, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield., 2007, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar., 1996, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit Gramedia Sarana Indonesia.
- Mulyadi, 1999, *Akuntansi Biaya*, Edisi Kelima, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Nainggolan, Pahala., 2005, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba* Sejenis, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- S.S. Harahap, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Soeharyo dan Effendi, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003.
- R.N. Anthony and D.w. Young, *Management Control in Nonprofit Organizations*, Richard D. Irwin Inc, Illinois, 1984.
- Warren, Niswonger dan Fess, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Edisi keenambelas, Erlangga, Jakarta, 1999
- Warren, S. Carl., James M. Reeve, dan Philip E. Fess, 2008, *Pengantar Akuntansi*, Buku Satu, Edisi 21, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Winarni, F ., dan G., Sugiyarso, 2001, *Konsep Dasar dan Siklus Akuntansi*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta